

# EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN NASIONAL LINGKAR PULAU SAMOSIR DI KABUPATEN SAMOSIR

Oleh:

Muara Parningotan <sup>1)</sup>

Marlon Sihombing <sup>2)</sup>

Darmanto <sup>3)</sup>

Universitas Terbuka <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[muara.limbong09@gmail.com](mailto:muara.limbong09@gmail.com) <sup>1)</sup>

[mrlnsihombing@gmail.com](mailto:mrlnsihombing@gmail.com) <sup>2)</sup>

[darmanto@ecampus.ut.ac.idm](mailto:darmanto@ecampus.ut.ac.idm) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The study aims at finding out how much is the budget for the land acquisition process for the implementation of the Samosir Ring Road; finding how much budget is proposed to develop an effective Samosir Circle as a measure of efficiency and finding how big are the obstacles faced by the Samosir government in widening Samosir district. The research sample is 50 land owners. Data collection techniques are in the form of questions, conducting interviews and observations. The results of this study indicate that the assessment team did not perform well. The road repair plan is in accordance with the law, and the presidential decree has not yet been implemented. This is evident in reports from direct interviews with the secretariat and district representatives, as well as other details on the road construction plan. Funds allocated to each district for land reform are ineffective or unused. Far from being effective. This is because the sub-district does not have a budget for the period 2017 to the end of 2018, so P2T cannot run normally, perhaps due to its small area. 1 Land value. Not finished yet. But the job is done.*

**Keywords:** *Effectiveness, Budget, Land Acquisition*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa anggaran proses pembebasan lahan untuk pelaksanaan Jalan Lingkar Samosir, berapa anggaran yang diusulkan untuk mengembangkan Lingkar Samosir yang efektif sebagai ukuran efisiensi dan seberapa besar kendala yang dihadapi pemerintah Samosir dalam pelebaran kabupaten Samosir. Sample penelitian adalah pemilik lahan yang berjumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data adalah dalam bentuk pertanyaan, melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim penilai tidak berkinerja baik. Rencana perbaikan jalan sudah sesuai dengan undang-undang, dan keputusan presiden belum dilaksanakan. Hal ini terlihat dalam laporan wawancara langsung dengan sekretariat dan perwakilan kabupaten, serta rincian lainnya tentang rencana pembangunan jalan. Dana yang dialokasikan ke setiap kabupaten untuk land reform tidak efektif atau tidak digunakan Jauh dari kriteria efektif. Hal ini dikarenakan kecamatan tersebut tidak memiliki anggaran untuk periode 2017 hingga akhir 2018, sehingga P2T tidak dapat berjalan normal, mungkin karena luasnya yang kecil. 1 Nilai tanah. Belum selesai. Tetapi pekerjaan sudah selesai.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Anggaran, Pengadaan Tanah*

## 1. PENDAHULUAN

Tanah bagian dari sumber daya alam yang terpenting untuk kelangsungan hidup antar umat manusia. Tanah juga bagian dari kekayaan yang dimiliki manusia berupa badan usaha pemerintah atau

individu pembangunan nasional yang berhubungan sebagai temoat mata pencarian masyarakat dan tempat tinggal masyarakat.

Pulau samosir merupakan salah satu destinasi Kawasan Strategi Pariswisata

Nasional (KSPN) dimana danau toba menjadi prioritas wisata yang diharapkan mengalami peningkatan pertumbuhan untuk ekonomi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah pusat ingin melakukan program daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat melalui kegiatan pariwisata.

Peningkatan Jalan NasiponalLingkar Pulau Samosir di Kabupaten Samosir direncanakan dalam dua paket revarasi yakni paket pertama dengan pelebaran jalan Pangururuan

- Ambarita-Tomok-Onan Runggu sepanjang 75,9KM dengan perkiraan siap pada Desember 2019 dan paket kedua pelebaran jalan Tele-Pangururuan
- Nanggolan-Onan Runggu sepanjang 68,43KM dengan perikaraan siap tahun 2020.

Berdasarkan dari perkiraan yang direncanakan rupanya meleset dan tidak sepenuhnya terlaksananya kedua paket tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pengadaan tanah. Permasalahan tersebut sering sekali membuat dilema karena pelaksanaan pengadaan tanah terkendala sehingga Kementerian PUPR mengambil tindakan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 yang ditetapkan

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang disahkan pada tanggal `14 Januari 2012 dengan Nomor 22 Tahun 2012. Pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur oleh PP No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah itu diubah menjadi PP No 65 Tahun 2006.

UU No 2 Tahun 2012 oleh para investor dimana setiap intansi diperbolehkan menggunakan peraturan lama atau memakai peraturan UU baru yang diatur oleh pasal transisi. Kebijakan ini dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk pengadaan tanah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah khususnya pada pemberian ganti rugi.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diselesaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Berapa anggaran proses pembebasan lahan untuk pelaksanaan Jalan Lingkar Samosir?
2. Berapa anggaran yang diusulkan untuk mengembangkan Lingkar Samosiryang efektif sebagai ukuran efisiensi?
3. Seberapa besar kendala yang dihadapi pemerintah Samosir dalam pelebaran kabupaten Samosir?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Efisiensi

Efektivitas mengacu pada keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan. Sementara efisiensi adalah salah satu dimensi produktivitas, kami fokus pada optimalisasi pekerjaan yang diselesaikan dalam hal kualitas, kuantitas dan waktu.

### 2. Anggaran

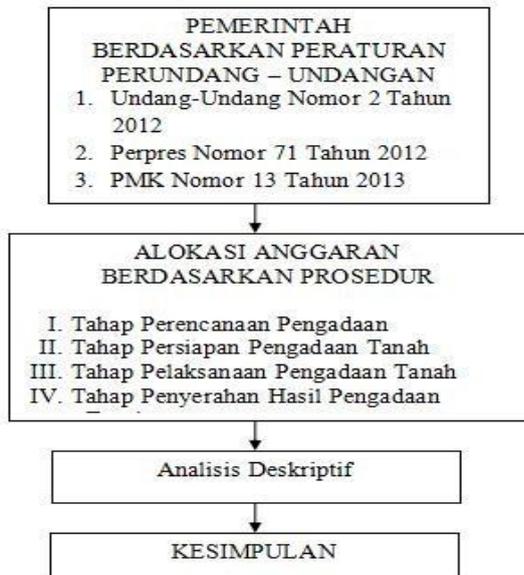
Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kota dan tidak mengabaikan keseimbangan antara dukungan keuangan dari negara dan administrasi, pembangunan dan pelayanan publik.

### 3. Akuisisi tanah

Istilah pembebasan tanah pertama kali dikenal sehubungan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun 1993 dengan keputusan presiden. 55.

Hak atas tanah berlaku bagi orang perseorangan yang menjadi obyek perolehan, seperti tanah/ruang bawahan, bangunan dan fasilitasnya, serta tanah atau barang berharga lainnya

## Kerangka Berpikir



### 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini pada dasarnya berupaya untuk mengetahui anggaran yang diberikan untuk pelebaran jalan lingkar nasional di Kabupaten Samosir oleh Pemerintah setempat. Penelitian Sampel yaitu pemilik seluruh lahan yang terkena pelebaran jalan lingkar nasional di Kabupaten Samosir sebanyak 50 orang. Proses pemodelan penelitian ini yaitu pengumpulan data berupa membuat pertanyaan, melakukan wawancara dan terakhir melakukan observasi. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini metode analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data, dan keluaran.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Lingkar Nasional di Kabupaten Samosir Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara dengan Nomor 188.44/105/KPTS/2017, perihal mengalihkan sepenuhnya kekuasaan kepada Wakil Presiden Samosir dengan tahap awal persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Lingkar Nasional di Kabupaten Samosir pada Perpres Samosir. Pada anggaran pengadaan

tanah menunjuk penilai publik sesuai dengan Peraturan Presiden 2012 Peraturan Presiden 2012, yang timbul dari UU 2 Tahun 2012. Samosir Register sudah memiliki layanan penilaian publik resmi. dan khusus untuk memperkirakan harga tanah, tanaman dan tanah. Bangunan ini dioperasikan oleh Grup Penilaian Tanah Kabupaten Samosir, yang didirikan oleh Berdopark Based.

### 2. Efektivitas Alokasi Anggaran Pengadaan Tanah untuk Pelebaran

Analisis deskriptif efektivitas alokasi anggaran dalam pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Lingkar Nasional dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja dari keempat kegiatan diatas. Berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 484 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Lingkar Nasional Kabupaten Samosir Di Kabupaten Samosir. Hasil pelaksanaannya berupa pengeluaran anggaran pembelian tanah, dimana target yang diinginkan adalah rencana pengeluaran untuk semua kegiatan pembelian, yang meliputi: 1) tahap perencanaan 2) tahap persiapan 3) tahap pelaksanaan dan 4) distribusi. .

### PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Lingkar Nasional di Kabupaten Samosir sesuai dengan UU.  
A. Tahap Perencanaan dalam Pengadaan; adalah pembebasan lahan pertama dan dipertimbangkan oleh Presiden Pertama. 2012 Pasal 71, Pasal 3-7. Rencana pembebasan lahan pemekaran Kabupaten Samosir diserahkan kepada Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir. Biasanya, setelah rencana diajukan, panitia bertemu dengan walikota yang merupakan bagian dari negara bagian yang terkena dampak

perluasan jalan tersebut. Interaksi antara maksud dan tujuan. Sinaga, anak laki-laki yang merupakan pegawai Perusahaan Pengadaan Tanah Kabupaten Samosir, mengatakan: "Negara-negara yang berkontribusi dalam pembangunan lingkaran nasional Kabupaten Samosir" (Hasil wawancara tanggal 20 September 2018).

**B. Tahap Persiapan dalam Pengadaan Tanah;**

Dengan team pembentukan, pendataan, konsultasi publik rencana pembangunan dan pencarian lokasi. Berdasarkan pernyataan dari pak Dr Mangihut Sinaga, MM yang merupakan ketua tim pengadaan tanah mengatakan: "*Jika seseorang telah membeli dan masih ada tanah yang belum dibeli, mereka dapat meminta ganti rugi dengan biaya. Jika tanah tidak tersedia untuk warga, tanah yang tersisa dapat dibayar dengan memeriksa tim audit sisa tanah. Audit sisa tanah perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti apakah pembangunan penghalang jalan akan lebih mahal dengan pembelian sisa tanah*" (wawancara tanggal 22 September 2018).

**C. Tahap Pelaksanaan dalam Pengadaan tanah;**

Dinas PU Kabupaten Pembelian Tanah menerima permohonan pembelian tanah dan dokumen pendukung lainnya dan kemudian mengawasi pelaksanaan pembelian tanah. Ketua tim pelaksana menyediakan anggaran untuk biaya operasional dan biaya perencanaan pembangunan. Persiapan, pencatatan, pengecekan informasi, penentuan sifat dan besaran iuran, pembayaran iuran, peninggalan iuran, pembebasan lahan dan peta lokasi.

**D. Tahap terakhir Penyerahan dalam pengadaan tanah; memperoleh dengan pembayaran ganti rugi kemudian dilakukan oleh pemilik yang mendaftarkan tanah dan segala**

isinya langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum Samosir dan Dinas Pekerjaan Umum Samosir mengajukan hak atas tanah tersebut dengan syarat :

- 1) Penolakan hak atas tanah karena pemegangnya berhak menerima ganti rugi.
- 2) Indonesia menduduki oleh Dinas Pembangunan Kabupaten Samosir.
- 3) Jika bumi tidak memiliki konflik dan tidak ada ikatan hutang.
- 4) Setelah menolak hak atas properti, penjual properti tidak memiliki hak atas properti.

**2. Alokasi Anggaran Tanah untuk Pelebaran Jalan Lingkar Nasional di Kabupaten Samosir**

Tim dan panitia pengadaan tanah berupaya mencari cara untuk pelaksanaan tanah dalam pembangunan jalan lingkar nasional di Kabupaten Samosir berjalan baik sesuai dengan harapan. Pelaksanaan ini bukan dari satu pihak saja melainkan untuk kepentingan umum yang akhirnya dinikmati oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Samosir.

**3. Hambatan dan upaya yang dialami Pemerintah Kabupaten Samosir pada saat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pelebaran Jalan Lingkar Nasional di Kabupaten Samosir**

Hambatan pertama dalam pembebasan lahan tanah yaitu data atau dokumen kepemilikan tanah tidak lengkap yang membuat panitia kesulitan dalam penyelesaian pembayaran ganti rugi. Upaya dalam mengatasi atau menyelesaikan persoalan ini, Tim Pengadaan Tanah dan para panitia lainnya membantu warga untuk melegalkan tanah agar menjadi sah secara hukum.

**5. SIMPULAN DAN SARAN**

**1. SIMPULAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa

wilayah Samosir sudah dikenal sebagai wilayah terbaru dan perlu dikembangkan di sana untuk meningkatkan masa depan wilayah Samosir dan mampu bersaing dengan wilayah/kota lain di Utara. Provinsi Sumatera. Dalam proyek pembangunan, tanah memerlukan pemilik atau penggerak dari beberapa masyarakat untuk mengelola tanah saat ini, oleh karena itu diperlukan tanah untuk pembangunan.

Dari pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa penilaian Statistik Nasional tidak mengalami peningkatan yang signifikan, karena sistem perpajakannya tidak terlalu rendah hati. Usulan untuk memperluas proses evolusi belum dilaksanakan dengan baik oleh undang-undang dan keputusan presiden. Diketahui dari laporan langsung Sekretaris Negara Bidang Bantuan dan Keamanan Masyarakat dan hasil rapat sekretariat daerah. Samosir dan Asisten Samosir dengan data sekunder dalam dokumen untuk memperluas jalur pengembangan. Dari keadaan anggaran tersebut terlihat bahwa anggaran yang dialokasikan belum efektif atau belum dilaksanakan di daerah manapun.

## 2. SARAN

- a) Melalui penelitian ini, peneliti berharap kedepannya Pemerintah Kabupaten Samosir dapat mengalokasikan anggaran ke kecamatan-kecamatan yang terjadi pelebaran jalan. Hal ini memungkinkan tim pengadaan tanah yang berkumpul dapat bekerja secara maksimal. Sehingga proses realisasinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan aturan yang disepakati.
- b) Ganti rugi atas kehilangan tanah

harus lebih tinggi dari harga pasar untuk apresiasi pemilik tanah yang rela mengorbankan hak negara, karena harga tanah cenderung naik terus, tetapi efisiensi anggaran harus bekerja agar kapasitas ekonomi daerah menjadi. Akun. Masih diperlukan upaya yang maksimal untuk mensosialisasikan UU No. 2 Tahun 2012 di dewan kota dan di kota agar ada pemahaman umum tentang arti, pentingnya, tujuan dan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum. agar Tim Penilai Harga Tanah tidak menemui kendala yang kompleks dalam mengurus masyarakat/pemilik tanah dalam menyelesaikan tugasnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Banyumedia, Malang,
- Angraini Christy.2016. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.Lex et Societatis, Vol IV/No. 5/Mei/2016
- Amelyana gustin, dkk.2018.Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.Universitas Brawijaya: Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2 No. 4 Hal 735 – 739
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.